BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 128 /KPTS/ XI /2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan telah terpilihnya anggota BPD yang baru secara demokratis pada 3 (Tiga) Desa di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, *maka perlu mengesahkan dan mengangkat anggota* Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 3 (Tiga) Desa di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembetukan Kabupten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Ibu Nomor :141/317/2019 tentang Penyampaian Hasil Pemilihan Anggota BPD Terpilih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dan Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih pada 3 (Tiga) di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

KETIGA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang telah berakhir masa tugas, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas dharma bhaktinya kepada bangsa dan negara selama ini;

KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh – sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KELIMA : Bilamana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan/atau berhenti, karena sesuatu dan lain hal maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nomor urut berikutnya untuk dianggkat dan disahkan sebagai Penganti Antar Waktu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 19 November 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Staf Ahli Bid. Hukum dan Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

DANY MISSY

Tembusan, disampaikan kepada
Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kabag. Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Camat Ibu di Ibu
6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 128 /KPTS/ XI/2019
TANGGAL : 19 November 2019
TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 3 (TIGA) DI KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

N	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1	AKEBOSO	1. PRAKLETOS SARUNI	1. FANTON LAMITI, S. Pd	ANGGOTA
		2. WEMPI MAFOR	2. FEBY CRISTOVEL UANG	ANGGOTA
		3. FANTON LAMITI	3. VIKTOR MARRY	ANGGOTA
		4. APRINA BAHEO	4. PRAKLETOS SARUNI	ANGGOTA
		5. RUBIANTO UGU	5. MARLINCE UMUR	ANGGOTA
2	KAMPUNG BARU	1. JUNAIB HAMJA	1. IMRAN YAKIN	ANGGOTA
		2. IKSAN PADIL	2. AJAM Hi. ABDULLAH	ANGGOTA
		3. HAIRUN UMAR	3. INDRAWATI DIN	ANGGOTA
		4. TALHATU GORAAHE	4. MURAD DOBI	ANGGOTA
		5. MURAD DOBI	5. ABDUL RAFIK YAKIN	ANGGOTA
3	TONGUTE TERNATE ASAL	1. AMIK SANTOSA	1. MUHAMMAD ISMAIL	ANGGOTA
		2. MUHAMAD ALIMUDIN	2. IKRAH Hi. ABDULLAH	ANGGOTA
		3. IKSAN INGI	3. IRAGISTI FALILA	ANGGOTA
		4. BURHAN BABA	4. ALFONSIUS FRANS	ANGGOTA
		5. AHMAD FALILA	5. IDHAM DIGA	ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Staf Ahli Bid. Hukum dan Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum dan Org	